

**FANATISME AGAMA
DALAM
GERAKAN POLITIK KEAGAMAAN**

Suatu Analisis Deskriptif Tentang Kasus Bima

SKRIPSI



KK
Fis p 139/97
Ari
f

MILIK
PEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

ARIEFUDIN
NPM : 078912382

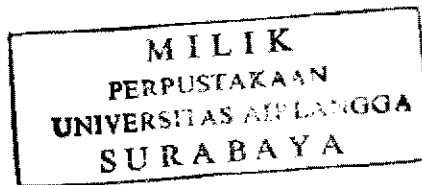
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL 1993 / 1994**

**FANATISME AGAMA
DALAM
GERAKAN POLITIK KEAGAMAAN**

Suatu Analisis Deskriptif Tentang Kasus Bima

SKRIPSI

**Sebagai Syarat Untuk Menempuh Gelar Sarjana
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik
Universitas Airlangga**



Oleh :

ARIEFUDIN
NPM : 078912382

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
SEMESTER GASAL 1993 / 1994**

Menyetujui
Skripsi Untuk Diujikan

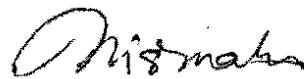
Dosen Pembimbing



Drs. Aribowo, MS.

NIP: 131453808

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Politik
F I S I P U N A I R



Drs. Priyatnoko, MA.

NIP: 130937952

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Komisi Penguji
FISIP UNAIR dan diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana SI pada hari
Kamis; tanggal 6 Januari 1994

Ketua:



Drs. A. Ramlan Surbakti, MA. Ph D

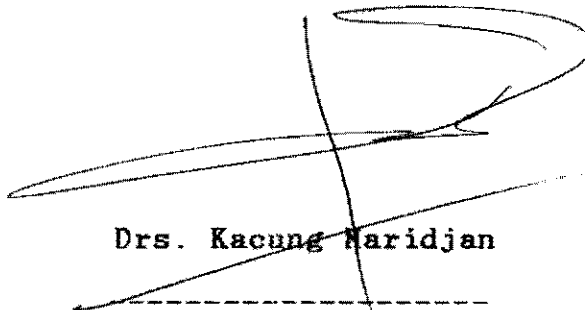
NIP: 130701133

Anggota:



Drs. Aribowo, MS.

NIP: 131453806



Drs. Kacung Naridjan

NIP: 131836623

BAB V

KESIMPULAN

Dari temuan dan analisis data berdasarkan analisis Gerakan Islamnya *A. Ezzatti* maka dapat disimpulkan bahwa Kasus Bima dapat diklasifikasikan ke dalam gerakan politik keagamaan. Adapun cara yang digunakan untuk mengklasifikasikan Kasus Bima adalah dengan memakai pendekatan teoritis. Dalam tradisi Islam terdapat kesejajaran antara agama dan politik. Kesejajaran itu karena agama dipahami sebagai sesuatu yang universal dan mencakup segala aspek kehidupan termasuk aspek politik yang merupakan bagian dari sistem secara keseluruhan. Disamping itu politik dipahami juga sebagai suatu gejala yang serba hadir maka setiap aktivitas individu dapat dikategorikan sebagai aktivitas politik.

Dengan menganalisis ciri - ciri gerakan keagamaan Islam, maka Kasus Bima termasuk di dalamnya. Karena pada dasarnya gerakan Islam menggunakan tauhid sebagai ideologinya. Kelompok Bima juga menggunakan aqidah tauhid sebagai dasar untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.

Transparan sekali bahwa Kelompok Bima menggunakan sumber dan azas politik yang bersifat Islami dalam

mengembangkan gerakannya. Juga legitimasi yang dijadikan sandaran adalah kondisi sosial yang tidak Islami menurut interpretasi mereka mendorong Kelompok Bima bergerak sebagai tuntutan moral akan tanggungjawab individu terhadap diri sendiri dan masyarakat sesuai dengan eskatologi Islam bahwa seseorang akan diminta suatu pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukannya selama dia hidup.

Perjuangan untuk melakukan suatu gerakan tersebut merupakan perjuangan suci yang identik dengan prinsip syahadah dalam tradisi Islam. Dari aplikasi teori dan analisis fakta itulah saya melihat bahwa yang dipertaruhkan oleh Kelompok Bima adalah ideologi agama dengan keinginan untuk membentuk Negara yang berdasarkan Islam pada akhirnya, berhadapan dengan negara (struktur kekuasaan, sistem politik dan aparat keamanan). Negara dan agama jelas merupakan pilihan yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Karena negara pada dasarnya dibentuk untuk mengatur kehidupan warga negara secara menyeluruh yang mengatasi berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa dan agama sekalipun. Kompleksitas unsur yang membentuk negara dan tuntutan akan implementasi nilai agama oleh penganut mayoritas pada sisi yang lain menjadi masalah mencasar akan eksistensi suatu negara kebangsaan.

Memang ada kerancuan hubungan antara pelaksana negara dan gerakan politik keagamaan dalam hal melaksanakan dan mengatur yang oleh satu pihak tidak benar. Maka negara menggunakan cara-cara persuasif, defensif untuk mengamankan kepentingannya. Sebaliknya gerakan politik keagamaan melakukan aktivitas lain yang dirasakan satu - satunya jalan untuk melaksanakan tujuan. Mereka mengajukan alternatif lain terhadap pola pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dengan mengajukan sejumlah prasyarat dan berusaha mengendalikan arah kehidupan bernegara dengan menggali unsur - unsur yang bersumber dari ajaran agama. Alternatif yang dilakukan kadang bersifat destruktif dalam masyarakat.

Namun bila kita menganalisis Kasus Bima dari kaca mata *Smelser dan Hagopian* ternyata tahap - tahap yang harus dilalui oleh suatu gerakan tidak sepenuhnya sesuai dengan Kasus Bima. Dari 4 tahap inkubasi yang digariskan oleh Hagopian, tahap yang dilalui oleh Kelompok Bima hanya tahap 1, 2, 3 dan kemudian 6.

Tahap pertama merupakan tahap awal suatu gerakan memang terlihat. Kekuatan keagamaan merupakan sendi dalam adat dan tradisi masyarakat Bima. Karakteristik Budaya dan struktur sosial mempengaruhi persepsi Kelompok Bima dalam melihat realita kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Juga mengandung aspek *structural strain* sebagai akibat adanya perbedaan pandangan hidup, posisi sosial dan pandangan tentang dunia antara Kelompok Bima dengan Sistem Politik secara struktural. Hal ini didukung lagi oleh adanya ambiguitas, deprivasi dan konflik antara H. A. G. M (tokoh gerakan) dengan Bupati H. DEMARHARUN Bsc. Ini sisi lain munculnya gerakan karena rasa frustrasi terhadap struktur yang ada disekitar mereka.

Sesuai dengan teori deprivasi relatif *Ted Robert Gurr* terdapat konflik H. A. G. M dengan elite politik Bima yang tersembunyi yang mana melahirkan sikap dan persepsi yang negatif,

Di samping itu Kelompok Bima dalam melakukan pengajian biasanya menyentuh struktur sosial politik, kebetulan pada saat kedatangan tamu dari Jakarta, isu - isu sosial ekonomi politik lebih dikedepankan. Sehingga tahap *spread of generalized belief* terjadi. Penyebaran isu sebagai sumber ketegangan seperti yang diceramahkan oleh Taufik Hidayat dan Achmad Jazuli mendapat respon yang positif. Mereka mendengarkan ceramah secara tekun kemudian mereka juga bersedia berangkat ke Jakarta dalam rangka mengikuti penataran pengkaderan sebagai juru dakwah.

Dengan demikian kesadaran dan kepercayaan religius itulah yang menambah keyakinan pada perlunya

gerakan. Tetapi gerakan Kelompok Bima ini tidak meluas apalagi menyebar ke seluruh masyarakat. Ini disebabkan karena Kelompok Bima baru melakukan konsolidasi ke dalam. Sebelum mereka melakukan perluasan gerakan ke luar, pemimpin dan anggotanya keburu di tangkap oleh pihak penguasa. Masyarakat Bima pada umumnya mengetahui di Bima ada upaya yang bersifat menentang pemerintah setelah munculnya Kasus Bima.

Tahap ke-6 yang disebut Hagopian sebagai tahap *institusional* tidak pernah terjadi dalam gerakan Kelompok Bima. Di samping gerakan yang mereka lakukan tidak terlembaga juga rentang waktu sebagai proses munculnya gerakan terlalu pendek sehingga Kelompok Bima tidak punya ruang gerak sama sekali untuk melakukan pengentasan maupun konsolidasi organisasi karena keburu ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan. Bagi elite politik Bima, kedatangan Fauzi di Bima, dijadikan bukti bahwa mereka ingin menggulingkan Negara Republik Indonesia. Di sini *the operation of social control* sebagai suatu tahap akhir suatu gerakan nampak. Tetapi sistem politik dan sistem kemasyarakatan memberikan reaksi kontra. Elite mempersepsikan bahwa Kelompok Bima adalah kelompok yang harus dihancurkan dan diamankan dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa. Elite politik lokal mendapat informasi bahwa Fauzi yang

pernah datang ke Bima telah ditangkap di Jakarta karena terbukti terlibat pada peristiwa Lampung.

Ternyata peranan H. A. G. M cukup besar dalam kalangan kelompoknya. Tetapi bukan termasuk dalam tipe yang dikemukakan oleh Hoffer. *The Man of Words* di sini lebih tepat adalah Taufik Hidayat, Achmad Jazuli, yang datang dari Jakarta yang dibawa oleh Anwar.

Fanatisme agama bukan sesuatu akibat dari kebangitan agama tetapi merupakan suatu distorsi dari kebangitan agama. Berdasarkan temuan data dan hasil analisis saya menyimpulkan bahwa Kasus Bima muncul juga disebabkan interpretasi akan nilai keagamaan dari pengikut Kelompok Bima terhadap realitas kehidupan socio-politik di Indonesia tidak didasari oleh pengetahuan yang memadai akan sesuatu fakta. Ide - ide yang dibawa oleh orang luar diterima begitu saja oleh mereka tanpa berusaha mencerna apa esensi yang sesungguhnya dari fenomena tersebut. Bahkan yang lebih tragis lagi, fenomena di Bima dan di Lampung dijadikan alat oleh penguasa untuk menangkap mereka. Kebanyakan anggota Kelompok Bima ditangkap dan diadili dengan tuduhan subversif. Padahal tidak ada keterkaitan antara peristiwa di Lampung dengan Kasus Bima dan ini merupakan pengalaman dan harga yang dibayar mahal oleh mereka dalam hidupnya sebagai bagian dari masyarakat Bima.